

INTISARI

PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI

Charlita Zettiradika Lushirifani* Supriyadi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam pemidanaan terhadap perkara pengulangan tindak pidana desersi pada waktu damai yang dilakukan oleh anggota TNI. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman pemidanaan terhadap perkara pengulangan tindak pidana desersi pada waktu damai yang dilakukan oleh anggota TNI di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara oleh narasumber, yakni hakim militer, oditur militer, serta akademisi. Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari narasumber dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, *ratio decidendi* hakim militer dalam perkara pengulangan tindak pidana desersi menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dengan menggabungkan penegakan disiplin, hierarki, serta stabilitas organisasi TNI yang bertujuan sebagai sarana preventif dan represif dalam sistem peradilan pidana militer. Kedua, pedoman pemidanaan dalam perkara pengulangan tindak pidana desersi pada waktu damai masih menimbulkan diskursus penjatuhan sanksi pidana karena belum adanya aturan yang tegas dan komprehensif dalam KUHPM, sehingga diperlukan penyusunan parameter pedoman pemidanaan yang spesifik melalui standar pemidanaan bertingkat guna menciptakan konsistensi dan meminimalkan subjektivitas hakim sebagai pembinaan dan pencegahan pelanggaran disiplin anggota TNI di masa mendatang.

Kata Kunci: Pengulangan Tindak Pidana, Anggota TNI, Pedoman Pemidanaan, Desersi Pada Waktu Damai.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

PUNISHMENT OF MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY FOR REPEATED CRIMINAL ACTS DESERTION IN TIMES OF PEACE

Charlita Zettiradika Lushirifani* Supriyadi**

This research aims to identify and analyze the ratio decidendi used by judges in sentencing cases of repeated desertion during peacetime committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). In addition, this study aims to analyze and formulate parameters that can be used by judges as guidelines for sentencing cases of repeated desertion during peacetime committed by TNI members in the future.

This research is a normative legal research supported by interviews with sources, namely military judges, military auditors, and academics. Based on the nature of the research, this study is descriptive. The data used in this study includes primary data obtained from sources and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, so the data analysis method is qualitative analysis. Conclusions are drawn using the deductive method.

Based on the results of the research and discussion, two conclusions can be drawn. First, the ratio of military judges in cases of repeated desertion uses legal and non-legal considerations by combining the enforcement of discipline, hierarchy, and stability of the TNI organization, which aims to be a preventive and repressive measure in the military criminal justice system. Second, sentencing guidelines in cases of repeated desertion during peacetime still give rise to discourse on the imposition of criminal sanctions due to the absence of explicit and comprehensive provisions in the Military Criminal Code (KUHPM). therefore, it is necessary to develop specific sentencing guidelines through a tiered sentencing standard to create consistency and minimize the subjectivity of judges as a means of guidance and prevention of disciplinary violations by TNI members in the future.

Keywords: Repetition of Criminal Acts, TNI Members, Sentencing Guidelines, Desertion in Times of Peace.

* Student of the Department of Criminal Law, Undergraduate Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Sleman, Special Region of Yogyakarta

**Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jl. Socio Justisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Special Region of Yogyakarta.